

PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KECAMATAN BUNAKEN KOTA MANADO

Oleh:
Novelson Mansoara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: mnovelson@yahoo.com

ABSTRAK

Belanja daerah merupakan bagian penting dalam sistem administrasi keuangan daerah. Terkait dengan sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, maka pencatatan akuntansi belanja daerah dan penyusunan Laporan Keuangan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencatatan akuntansi belanja daerah dan penyusunan Laporan Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bunaken Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data arsip dengan menggunakan teknik pengumpulan data di basis data untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian diketahui bahwa pencatatan akuntansi belanja daerah dan penyusunan Laporan Keuangan telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin oleh SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005.

Kata kunci: *belanja daerah, akuntansi, laporan keuangan, keuangan daerah*

ABSTRACT

Regional expenditures is an important part of the local financial administration system. Related to the region's financial accountability system, then the accounting records of regional spending and the preparation of the Financial Statements should be implemented as possible. This research aims to determine whether the accounting records of regional expenditures and the preparation of the Financial Statements at Working Unit (SKPD) Sub-district Bunaken Manado City has been conducted in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 13 of 2006 and Government Regulation No. 24 of 2005. Method of collecting conducted the data by using data collection techniques at the database to obtain secondary data. Results show that the accounting records of regional expenditures and the Financial Statements have been implemented as possible by the Working Unit (SKPD) Sub-district Bunaken Manado City in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 13 of 2006 and Government Regulation No. 24 of 2005.

Keywords: *regional expenditures, accounting, financial statements, local financial*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Belanja daerah merupakan bagian penting dalam sistem administrasi keuangan daerah, karena hal ini terkait dengan sistem pertanggungjawaban keuangan negara dan pemerintah daerah khususnya. Menurut pasal 289 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi atas semua transaksi keuangan yang meliputi aset, utang dan ekuitas dana yang berada dibawah tanggung-jawabnya. Untuk tingkat kantor dan/atau satuan kerja, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mendelegasikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan akuntansi/pertanggungjawaban/pelaporan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan kantor atau SKPD terkait.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA).

Kecamatan Bunaken sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kota Manado sekaligus sebagai pengguna anggaran diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran belanja sesuai dengan program kegiatan yang dijalankan, serta harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 ayat (5) disebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD Kecamatan Bunaken akan menjadi sumber bagi Pemerintah Kota Manado dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Manado. Berdasarkan data yang dirilis pada website resmi BPK RI (<http://www.bpk.go.id>), diketahui bahwa opini yang diberikan BPK RI kepada entitas pelaporan Pemerintah Daerah Kota Manado dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir (T.A 2007 s/d T.A 2011) didominasi oleh opini 'tidak wajar'. Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bunaken Kota Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pencatatan akuntansi belanja daerah di SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan,
2. Untuk mengetahui apakah SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado telah menyusun Laporan Keuangan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan,

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU 17/2003).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, Iqbal, 2012 : 24).

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi adalah suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu (Halim, 2007 : 83).

Harahap (2011: 4) menyatakan akuntansi adalah *tool of management*, alat kapitalis untuk mengumpulkan harta dan memeliharanya agar proses akumulasi kekayaan berjalan lancar dan penguasaannya tetap di tangan kapitalis.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemda. (Halim, 2007: 84).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan (Mursyidi, 2009: 288-289).

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan merupakan bagian dari input (dokumen), peringkasan kejadian keuangan merupakan bagian dari proses (catatan), hingga pelaporan keuangan merupakan bagian dari output hal ini dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD (Halim, dkk, 2010: 101).

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (Permendagri 13/2006, Pasal 247: 1).

Akuntansi Belanja

Belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut: Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Transaksi belanja di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Transaksi dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Transaksi belanja di Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan dua (2) cara yaitu :

1. Mekanisme UP/GU/TU
2. Mekanisme SP2D LS

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian konklusif atau confirmatory research terhadap pencatatan belanja daerah dan pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bunaken Kota Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Bunaken. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih 4 (empat) bulan yang dimulai dari bulan Januari 2013 s/d Mei 2013.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan penelitian sebagai berikut:

1. Persiapan penelitian
2. Penentuan populasi dan sampel
3. Pengumpulan data
4. Analisis
5. Kesimpulan

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (Kuncoro, 2009 : 145).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro, Supomo, 2012 : 147).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data arsip dengan menggunakan teknik pengumpulan data di basis data untuk mendapatkan data sekunder.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Transaksi

Pendapatan

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado selama Tahun Anggaran bersangkutan. Karena SKPD Kecamatan Bunaken merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka tidak ada pencatatan terhadap pendapatan, sehingga tidak ada bendahara penerimaan pada SKPD Kecamatan Bunaken. Transaksi penerimaan kas hanya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu penerimaan kas atas dana yang akan digunakan untuk kegiatan SKPD Kecamatan Bunaken selama Tahun Anggaran bersangkutan.

Belanja

Pengeluaran pada SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado di bagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Operasi yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai, yakni belanja yang berhubungan langsung dengan pegawai yang ada di lingkungan SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado berupa gaji dan tunjangan, honor, serta belanja pegawai lainnya yang bersifat variabel atau tidak tetap.
 - b. Belanja barang, merupakan pengeluaran untuk penyediaan Barang dan Jasa antara lain Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Cetak dan Penggandaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor, Biaya Telepon, Biaya Perjalanan Dinas, biaya BBM, biaya jasa servis dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, belanja makanan dan minuman, dan lain sebagainya.
2. Belanja Modal yaitu belanja untuk pengadaan peralatan dan mesin (aset tetap), antara lain adalah komputer, laptop, printer, meja kerja dan kursi kerja, lemari arsip, meja komputer, dan lain sebagainya.

Aset

Aset yang dimaksud adalah aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado, yaitu berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya.

Jurnal

PPK-SKPD melakukan penjurnalan setelah menganalisis transaksi yang ada pada bendahara pengeluaran. Jurnal yang dibuat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Penerimaan Kas
2. Jurnal Pengeluaran Kas
3. Jurnal Umum
4. Jurnal Korolari

Buku Besar

PPK-SKPD akan melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing setelah melakukan pencatatan pada buku jurnal. Posting dilakukan secara periodik.

Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian dibuat untuk koreksi kesalahan atas pencatatan yang terjadi maupun untuk mencatat sisa barang persediaan dari pada tahun bersangkutan.

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Posting yang dilakukan ke buku besar terhadap jurnal penyesuaian, akan ada beberapa perkiraan yang mengalami perubahan dan juga akan ada rekening baru yang muncul. Saldo-saldo perkiraan yang masuk dalam Neraca Saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening yang sudah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka perkiraan tersebut dimasukkan dalam Neraca Saldo setelah Penyesuaian.

Laporan Keuangan

PPK-SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Keuangan ini nantinya disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran SKPD.

Laporan Keuangan yang disusun oleh PPK-SKPD Kecamatan Bunaken terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan data penelitian Laporan Realisasi Anggaran SKPD Kecamatan Bunaken tahun anggaran 2012 hanya berupa Belanja. Total realisasi belanja untuk tahun 2012 adalah Rp 5.189.341.526 atau mencapai 93,80% dari total belanja yang dianggarkan pada tahun tersebut yaitu sebesar Rp 5.532.086.948. Realisasi belanja tersebut terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai Rp 4.818.185.161
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp 116.647.315
- c. Belanja Modal Rp 254.509.050

2. Neraca

Berdasarkan data penelitian Neraca SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado Tahun Anggaran 2012 menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Bunaken sebesar Rp 2.954.362.755. Kewajiban yang dimiliki adalah berupa Kewajiban Jangka Pendek Sebesar Rp 86.186.936. Sedangkan Ekuitas dana yang dimiliki adalah sebesar Rp 2.954.362.755.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan data penelitian, Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado Tahun Anggaran 2012 menyajikan informasi sebagai berikut:

- a. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado
- b. Kebijakan akuntansi pada SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado
- c. Penjelasan pos-pos keuangan
- d. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Jurnal Penutup

PPK-SKPD membuat jurnal penutup untuk menutup saldo perkiraan nominal supaya tidak terbawa ke periode anggaran berikutnya. Jurnal penutup yang dibuat oleh PPK-SKPD berupa jurnal untuk menutup rekening penerimaan dan pengeluaran PFK, jurnal untuk menutup rekening belanja dan jurnal untuk menutup perkiraan surplus/defisit.

Pembahasan

Penerapan Akuntansi Belanja

Pencatatan Belanja pada SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU) maupun untuk belanja LS-Gaji dan Tunjangan dan belanja LS- Barang dan Jasa.

SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado juga sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal, posting ke buku besar masing-masing perkiraan, membuat Jurnal Penyesuaian, menyusun Neraca Saldo dan Neraca Saldo setelah penyesuaian, menyusun Laporan Keuangan serta membuat jurnal penutup. SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado juga sudah menggunakan format pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan Akuntansi Aset

Aset yang dimaksud adalah Aset Tetap, dan akuntansi aset merupakan lanjutan dari akuntansi belanja yang menghasilkan Aset Tetap. Akuntansi Aset pada SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi terhadap penambahan dan pengurangan nilai aset. Akuntansi Aset ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Analisis Pelaporan Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan tahunan, SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado telah menyusun Laporan Keuangan Tahunannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan dan belanja yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu tahun anggaran.
2. Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran.
3. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target kinerja SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado.
 - b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado.
 - c. Kebijakan akuntansi pada SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado.
 - d. Penjelasan pos-pos keuangan.
 - e. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. SKPD Kecamatan Bunaken Kota Manado telah melakukan pencatatan akuntansi belanja daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan pencatatan tersebut meliputi jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dan jurnal penutup. Kegiatan pencatatan tersebut dilakukan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran.
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya tahun anggaran 2012) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan, dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saran

Beberapa hal yang diusulkan adalah :

1. Untuk tahun anggaran 2013 hendaknya Kecamatan Bunaken Kota Manado dalam pengelolaan keuangan daerah tetap berpedoman sepenuhnya kepada peraturan-peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.

2. Perlu adanya sumber daya manusia pada Kecamatan Bunaken Kota Manado yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai (SDM) mengenai akuntansi pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah* (1st ed.). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A dan M. Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah* (3rd ed.). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Halim, Abdul; Restianto, Yanuar E; Karman, I Wayan. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Harahap, S. S. 2011. *Teori Akuntansi* (Edisi Revisi 2011 ed.). PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Indriantoro, N dan B. Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi* (3rd ed.). (W. Hardani, & D. Barnadi, Penyunt.). Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia* (I ed.). (A. S. Mifka, Penyunt.). PT. Refika Aditama. Bandung
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2005). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2006). Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. (2003).: Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta